



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KEMENHUB ANGGARKAN RP12,2 TRILIUN UNTUK SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS DAN PSO

**Dewi Restu Mangeswuri**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dewi.mangeswuri@dpr.go.id](mailto:dewi.mangeswuri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran subsidi angkutan perintis dan *public service obligation* (PSO) di seluruh moda transportasi pada tahun 2024 sebesar Rp12,2 triliun. Alokasi anggaran tersebut meningkat 34% dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2023, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp9,1 triliun. Kemenhub berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau melalui program subsidi perintis dan PSO angkutan kelas ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dikarenakan melalui subsidi dan PSO sebagian biaya operasional dari operator transportasi dibayarkan oleh pemerintah sehingga tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau.

Program subsidi perintis dan PSO angkutan kelas ekonomi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang berada di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) di Indonesia. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan layanan transportasi publik yang terjangkau, membuka keterisolasian wilayah, dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik. Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi, dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antarwilayah.

Sejumlah program subsidi dan PSO yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini, antara lain: di sektor darat berupa subsidi keberintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antarmoda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/*Buy The Service* (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan *long distance ferry* di 2 lintasan.

Kemudian di sektor laut, yaitu: subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek. Sementara di sektor udara, yaitu: subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum. Di sektor perkeretaapian, program subsidi dan PSO diberikan untuk subsidi layanan kereta api perintis di 5 wilayah yaitu di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh, serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menuturkan, rencana kenaikan subsidi angkutan perintis merupakan salah satu upaya Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Menurutnya, kenaikan subsidi tersebut perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat terutama di daerah 3TP yang membutuhkan akses transportasi optimal. Djoko menyampaikan, meningkatnya anggaran subsidi angkutan perintis diharapkan dapat

menggenjot kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Diharapkan semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial sehingga alokasi anggaran subsidi bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

## Atensi DPR

Kemenhub mengalokasikan anggaran subsidi angkutan perintis dan *public service obligation* (PSO) di seluruh moda transportasi pada tahun 2024 sebesar Rp12,2 triliun, meningkat 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi ini benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan angkutan kelas ekonomi bagi PSO dan di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) bagi perintis. Komisi V DPR RI juga perlu meminta pemerintah melakukan evaluasi atas realisasi anggaran subsidi angkutan perintis secara periodik. Komisi V DPR RI perlu memastikan agar Kemenhub melakukan pemetaan dan perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan perintis, serta penataan terhadap jalur angkutan perintis supaya dapat berjalan selaras dan tidak bersinggungan dengan rute komersial yang telah dilayani swasta.

## Sumber

dephub.go.id, 26 Januari 2024;  
ekonomi.bisnis.com, 28 Januari 2024;  
finance.detik.com, 27 Januari 2024; dan  
*Rakyat Merdeka*, 28 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

 @pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024